

TAJUK RENCANA

Politik 'Susu Murni'

PASANGAN Calon Presiden dan Wakil Presiden (Paslon Capres-Cawapres) nomor urut 02 dalam Pemilu 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, telah menjanjikan program Makan Siang Gratis dan Susu Gratis untuk anak-anak bila memenangkan Pemilihan Presiden. Sementara itu, hasil penghitungan perolehan suara sementara Pilpres 2024 menunjukkan pasangan 02 unggul jauh dari Paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Perolehan suara sementara Paslon 02 mencapai lebih dari 50 persen, dengan keunggulan lebih dari separo 38 provinsi yang ada di Indonesia. Sampai saat ini, tahapan rekapitulasi masih berjalan. Pro kontra terhadap proses penghitungan perolehan suara Pilres juga masih mendapat banyak sorotan, bahkan beberapa pihak menilai ada kecurangan-kecurangan.

Sekadar berandai-andai, kalau nantinya KPU menetapkan Paslon 02 sebagai pemenang Pilpres 2024, maka program Makan Siang Gratis dan Susu Gratis untuk anak-anak harus benar-benar diwujudkan. Namun kemudian muncul pertanyaan, dari mana anggaran untuk mewujudkan program tersebut?

Seperti diungkapkan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, anggaran untuk program makan siang gratis sekitar Rp 15.000 peranak. Anggaran itu belum termasuk untuk program susu gratis. Besaran anggaran akan diterapkan secara merata di semua wilayah Indonesia. Rincian program tersebut harus didiskusikan dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PP-KF) 2025 dalam rapat kabinet.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara

Jakarta, Senin (26/2) lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati minta agar perancangan APBN makin dipertajam, sehingga APBN mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental. APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen andalan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Indonesia.

Berkaitan dengan program makan siang gratis, Menteri Investasi Bahilil Lahadalia menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sudah memiliki data terkait jumlah ibu hamil hingga balita, serta anak-anak sekolah mulai dari TK, SD dan SMP. Dari data yang ada, bisa dihitung anggaran untuk makan siang gratis.

Bahilil juga mengatakan, pembahasan RKP 2025 dan RAPBN 2025 harus mengakomodasi program-program presiden terpilih ke depan. Pembahasan program makan siang gratis itu tidak mendahului KPU RI, sebab hal itu hanya sebagai langkah antisipasi, simulasi dan rancangan saja.

Semua orang bisa dan boleh berandai-andai. Seandainya 'proyek super raksasa' Makan Siang Gratis dan Susu Gratis, bisa membuka peluang lebih besar terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebaliknya, program Makan Siang Gratis mengingatkan kita pada kasus konsumsi untuk calon anggota KPPS yang hanya mendapat 'roti layu'. Dari plafon Rp 15.000 hanya tersaji konsumsi seharga Rp 2.500.

Sementara itu, program Susu Gratis mengingatkan kita pada lirik tembang Susu Murni ciptaan Cak Diqin (Almarhum). *Wujud pancen cilik, isine mung sethithik. Ning nyatane gedhe tenan kasiyate.* Tetapi kalau 'proyek susu' dikorupsi, akan selaras dengan lirik *Sing sapa wis ngrasakke mesthi takon tunggale.* Yang bisa dikorupsi, maksudnya.

Nah, kita tunggu saja bagaimana politik 'susu murni' yang akan datang. □

Apa Kabar Demokrasi Pancasila?

Arif Jamali Muis

APA KABAR Demokrasi Pancasila? Dalam perbincangan akhir - akhir ini terkait pesta demokrasi 2024, saya jarang mendengar istilah Demokrasi Pancasila disebut - sebut. Bahkan seakan - akan lenyap dalam perbincangan. Entah karena alergi dianggap 'orde baru' (karena istilah ini lekat dengan orba), atau memang sudah disingkirkan dari khazanah perpolitikan bangsa ini.

Demokrasi secara mahfum sering dimaknai sebagai kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan dipergunakan untuk rakyat. Tentu makna ini sangat baik. Akan tetapi mekanisme untuk memperoleh kekuasaan tersebut sering kehilangan makna dan nilai sehingga menghalalkan segala cara.

Pendiri Bangsa

Para perumus dan pendiri bangsa ini paham betul bahwa demokrasi yang liar bisa membawa bencana kehidupan bangsa. Meletakkan demokrasi dalam koridor ideologi Pancasila merupakan cara para pendiri bangsa untuk membentengi demokrasi agar tidak jatuh pada kekuasaan tirani yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan pada nilai dan etika yang terkandung pada sila - sila dalam Pancasila. Berdemokrasi harus mensandarkan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai - nilai universal agama seperti keadilan, kejujuran, berbudi baik pada sesama dan kesalahan individu maupun sosial harus dijadikan spirit dalam berdemokrasi. Langkah politik yang diambil harus disadari tidak hanya dipertanggungjawabkan dihadapan rakyat tetapi juga dipertanggungjawabkan kelak dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kesadaran pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa ini akan menjaga para politisi untuk tidak 'brutal' dalam berkontestasi politik.

Berdemokrasi juga harus menyadarkan para politisi - nilai kemanusiaan seperti yang tertuang pada sila ke-2 Pancasila. Nilai - nilai kemanusiaan harus dijunjung



KR-JOKO SANTOSO

harus menjadi semangat bersama bagi para politisi. Tindakan - tindakan yang mengakibatkan perpecahan dan polarisasi ditengah masyarakat iharami dilakukan oleh para politisi.

Betapa indah dan bahagia jika politisi bangsa ini memegang teguh ketiga nilai di atas. Tindakan yang diambil bersandarkan pada kerendahan hati pada kekuasaan Tuhan, terimplimentasi dalam penghargaan terhadap nilai - nilai kemanusiaan, serta menjaga persatuan bangsa. Ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan adalah nilai moral, etika atau value yang harus dimiliki oleh politisi kita sebagai konsekuensi pilihan bangsa terhadap ideologi Pancasila.

Dalam Demokrasi Pancasila tidak hanya berhenti pada ketiga nilai di atas. Demokrasi pancasila memberikan cara dalam berdemokrasi, yaitu dengan bermusyawarah untuk mufakat dengan mengedepankan sikap hikmah dan kebijaksanaan yang tertuang dalam sila ke-4 Pancasila. Hikmah dan kebijaksanaan adalah sikap kedewasaan yang harus dimiliki ketika bermusyawarah dan bermegosiasi.

Dan tujuan akhirnya, adalah keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Harusnya dalam pikiran politisi Indonesia ketika terjun ke dunia politik adalah kesejahteraan rakyat. Bukan kesejahteraan dan kepentingan kelompok, golongan apalagi keluarga sendiri.

Pengkhianatan

Apakah masih ada politisi bangsa ini yang melandaskan pada Ideologi Pancasila? Apakah pesta demokrasi yang baru saja rakyat Indonesia jalani masih menunjukkan Demokrasi Pancasila?

Sekali lagi mungkin dianggap klise, teoritis dan bahkan utopis. Nilai - nilai diatas, itulah nilai yang dirumuskan pendiri bangsa yang termaktub dalam konstitusi bangsa ini. Tindakan yang bertentangan dengan nilai - nilai Pancasila adalah wujud nyata pengkhianatan terhadap konstitusi. Kita membutuhkan tidak hanya politisi tetapi kita membutuhkan negarawan yang berlandaskan pada nilai - nilai Pancasila. Apakah itu ada sekarang? □

***) Arif Jamali Muis MPd, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY dan Guru Matematika SMAN 5 Yogyakarta.**

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Memenjara Hati Demi Tunjangan Profesi

R Gunawan Susilowarno

PENDIDIKAN di Indonesia bertumbuh dan berkembang sesuai dengan konteks perkembangan zaman. Di era digitalisasi seluruh aspek aktivitas pendidikan didominasi aplikasi yang terintegrasi. Terakhir yang menimbulkan kegaduhan di kalangan pendidik adalah Platform Merdeka Mengajar (PMM) termasuk di dalamnya E-kinerja Guru. Ironis, media nasional hasil survei internal Perhimpunan Pendidik dan Guru (P2G) mengungkap 78,3% guru menyatakan PMM tidak meringankan kerja mereka. Bahkan 83,4% guru merasa PMM menambah beban.

E-Kinerja dalam PMM terbukti menjadi dilema bagi pendidik. Di satu sisi pendidik sepenuh hati tergerak untuk senantiasa merengkuh tanggung jawab utamanya dalam mendidik siswa di dalam kelas dan di luar kelas. Dalam konteks ini pendidik terpanggil melalui interaksi dengan siswa untuk dapat masuk menyentuh hati terdalam. Mengubah diri siswa dari pembelajar yang semula didikte menjadi mempunyai kesadaran diri yang penuh sebagai pembelajar mandiri. Atau siswa memahami belajar itu untuk sepanjang hayat. Esensi pendidikan ini hanya dapat dicapai dengan adanya deferensiasi hati pendidik yang tulus-iklas tanpa batas. Juga yang membentuk ikatan kuat dan tidak akan bisa digantikan dan digambarkan melalui teknologi termasuk di dalamnya aplikasi dalam PMM.

Daya Dukung

Di sisi lain pendidik dihadapkan keterbatasan pendapatan untuk dapat hidup secara layak dan membeli daya dukung untuk mendidik siswa yang kian hari kian meningkat dan mahal. Harapan yang paling realitis adalah dari Tunjangan Profesi Guru (TPG). Prasyarat untuk mendapatkannya adalah menda-

patkan penilaian baik melalui aplikasi E-kinerja. Indikator-Indikator penilaian dalam aplikasi ini berbasis data atau bukti sesuai yang harus terverifikasi. Praktiknya verifikasi yang terjadi berbasis pertemanan. Sehingga menjadi sekadar kewajiban untuk penenuhan administrasi. Dan gagal menampilkan *performance* kinerja pendidik yang otentik seperti yang diharapkan.

Pada dimensi waktu, pemenuhan bukti nyata sertifikat pelatihan, dan laporan tertulis yang diupload di aplikasi membutuhkan waktu yang lebih banyak berbenturan dengan jadwal mendidik siswa, waktu yang tersedia untuk keluarga dan masyarakat. Faktanya sebagian besar guru terpaksa meninggalkan kelas, mendelete waktu untuk keluarga dan kebersamaan masyarakat di lingkungannya, hanya untuk mendapatkan banyak sertifikat. Atau mengerjakan laporan administrasi agar terpenuhi penilaian sesuai tuntutan monopoli aplikasi. Pendidik semacam ini hatinya telah terpenjara aplikasi. Sehingga bertransformasi menjadi budak data demi tunjangan profesi. Dalam praktik ini pendidik yang disebut profesional telah gagal untuk menunjukkan kompetensi pedagogi, pribadi, dan sosial secara seimbang dan harmoni.

Kemerdekaan Sejati

Besyukurlah, jika masih ada pendidik-pendidik yang dengan teguh hati dan tetap setia memilih berpihak pada keterbukaan hati siswa. Sehingga memberikan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan serta ajur-ajer dalam me-

rayakan hasil pembelajarannya setiap hari bersama siswa. Guru sekaligus pendidik yang mempunyai kemerdekaan sejati semakin langka ditemukan di zaman dehumanisasi pendidik sekarang ini.

Lalu dimana apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan marwah dan martabat guru pendidik agar tetap mulia? Guru pendidik adalah profesi spesial, tidak seperti profesi-profesi lainnya dimana hasil nyata dapat diukur secara presisi. Spesialisasi profesi guru terletak pada kutulusan hati untuk melayani siswa sepanjang dan tidak terbatas waktu selama didik. Dalam segala kondisi serta sepanjang usia guru.

Siswa tidak pernah akan menyebut guru pendidik sebagai mantan guru. Mereka tetap akan menyebutnya Bapak dan Ibu Guru. Selamanya. □

***) R Gunawan Susilowarno, Guru SMA Budi Utama Yogyakarta, Sekjen Forum Pembimbing Peneliti Belia Indonesia**

Pojok KR

KPPU akan mendalami persaingan usaha yang menyebabkan harga beras mahal. -- KPPU bukan KPU. *** Anggota Komisi II DPR RI menyatakan belum ada perubahan jadwal Pilkada 2024. -- Hanya belum? *** Bank BPD DIY berkomitmen mendukung percepatan digitalisasi daerah. -- Kita dukung juga.

Beraba

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Hukuman Sosial Pelaku Vandalisme

VANDALISME merupakan sebuah perilaku nir-adab. Entah apa yang ada di benak mereka, kala mencoret-coret tembok pagar bahkan rumah atau pintu garasi yang tentu bukan miliknya. Kepuasan apa yang didapat disitu, seringkali membuahkan tanya.

Karena itu tertangkapnya pelaku vandalisme di Jl Kaliurang dan kemudian dihukum untuk membersihkan coretan, sangat layak dilakukan. Hukuman social harus dilakukan dengan tujuan edukasi agar tidak melakukan perilaku tanpa adabnya di tempat lain. Mengingat selama ini,

para pelaku vandalisme yang tertangkap dkenai sanksi sesuai keinginan pemilik bangunan. Tetapi apakah ini mencegah perilaku tak beradabnya dilakukan lagi?

Mungkinkah anak tersebut diminta menandai perjanjian tidak melakukan lagi? Jika sampai melakukan kejahatan lagi, ia harus rela dibina di panti dengan beaya orangtua? Dengan demikian, orang tua dan masyarakat di lingkungan tinggal (mungkin) bisa turut mengawasinya. □

***) Susila MPd, Minomartani Ngaglik Sleman**

Pengawasan Parkir di Malioboro

PARKIR di Malioboro itu tidak ada, kecuali parkirnya becak dan andong/dokar. Kendaraan tradisional itu memang menjadi egawangi mereka, para wisatawan yang ingin berkeliling dengan kendaraan tradisional. Namun entah jumlahnya yang berlebihan atau bagaimana, acapkali mereka tidak menggunakan tempat untuk parkir di tempat yang semestinya.

Sebab acapkali becak dan andong tidak parkir di jalur lambat namun menggunakan bahu jalan yang artinya membuat Jl Malioboro menyempit, karena sisi Barat (kanan) digunakan sebagai deretan parkir. Terus terang, ini mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya. Pengawasan parkir di Malioboro ini perlu tegas. □

***) lin, Purwanganng Yogya**

Kedaulatan Rakyat
SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerbit: Drs H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriza Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Ishaq Zubedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Samarang : Jalan Lamparsari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP. Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP